



REVISI RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENGURUS TAHUN 2020

**KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD
JAKARTA 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
PENDAHULUAN	1
RENCANA KERJA PENGURUS TAHUN 2020.....	9
A. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan	9
B. Pembinaan Anggota	9
C. Pelayanan Pendidikan dan Sosial.....	9
D. Pengelolaan Usaha	10
E. Pengembangan Usaha	11
F. Pengelolaan Keuangan	12
G. Pengelolaan Aset.....	13
H. Pengelolaan Personil/Karyawan.....	13
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 2020	15
A. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Simpan Pinjam	16
B. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Toko	18
C. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Fotocopy&Travel	21
PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020	15
Tabel 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Simpan Pinjam.....	16
Tabel 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Toko.....	18
Tabel 4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Fotocopy&Travel.....	21

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RK dan RAPBK) Tahun Buku 2020 dapat disusun dan selesaikan dengan baik. RK dan RAPBK Tahun 2020 merupakan rencana kerja bagi Pengurus Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2019 sampai dengan 2021. RK dan RAPB Tahun 2020 disusun berdasarkan pada realisasi kegiatan Tahun Buku 2019 dan memperhatikan aspirasi anggota serta perkembangan yang terjadi dengan tetap mengupayakan efisiensi dan penyesuaian di berbagai bidang kegiatan usaha.

Pengurus Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud telah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggotanya serta masyarakat sehingga dilakukan upaya yang dituangkan rencana kerja pada tahun buku 2020 dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Masa pandemic covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta bekerja dari rumah (WFH) telah mempengaruhi perekonomian nasional, tidak terkecuali usaha koperasi pegawai Balitbang Kemendikbud. Dampak PSBB dan WFH tersebut mengakibatkan penutupan kantor Kemendikbud dengan pemberlakuan bekerja dari rumah. Hal tersebut menyebabkan usaha dan layanan koperasi tidak berjalan dengan baik. Dampak terburuk adalah dengan penutupan usaha Toko dan Fotokopi selama Maret sampai dengan Juni 2020. Usaha Toko yang selama ini ramai oleh pembeli dari para pegawai dan tamu di lingkungan Kemendikbud, selama masa pandemic covid-19 dan *WFH* menjadi sepi pengunjung. Layanan minuman, snack dan makan juga mengalami penurunan drastis karena tidak ada kegiatan Rapat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Pengurus dan Pengawas serta RAPB Tahun Buku 2020 berdasarkan analisis yang diuraikan dan dijelaskan secara rinci sebagai bahan pertimbangan Revisi RK dan RAPBK Tahun Buku 2020.

RK dan RAPBK TB 2020 akan dijadikan pedoman pelaksanaan kerja bagi Pengurus dan Pengawas dalam menjalankan usaha Koperasi, dan sebagai dasar penilaian kinerja usaha pada tahun buku 2020.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama seluruh Anggota, Pengawas, Pengurus, dan Karyawan dalam penyusunan RK dan RAPBK TB 2020, semoga dapat tercapai dengan baik.

Jakarta, 31 Juli 2020

Ketua Pengurus,

Hafidz Muksin

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22 menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Selanjutnya berdasarkan huruf d Pasal 23 menyatakan bahwa Rapat Anggota berwenang menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK dan RAPB) Tahun 2020 merupakan rencana kerja bagi Pengurus Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2019 sampai dengan 2021. RK dan RAPB Tahun 2020 disusun berdasarkan pada realisasi kegiatan Tahun Buku 2019 dan memperhatikan aspirasi anggota serta perkembangan yang terjadi dengan tetap mengupayakan efisiensi dan penyesuaian di berbagai bidang kegiatan usaha.

Penyusunan RK dan RAPB Tahun 2020 diupayakan untuk:

1. Meningkatkan pengelolaan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang efektif, efisien, dan profesional;
2. Meningkatkan hubungan kerja Anggota dengan Pengurus, Pengawas, dan Karyawan;
3. Meningkatkan pendapatan usaha yang dikelola Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud;
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan kepada anggota dan masyarakat lainnya;
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam penyusunan RK dan RAPB Tahun 2020, Pengurus Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggotanya serta masyarakat. Guna peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan program kerja dan laporan keuangan, Pengurus telah melakukan pendidikan/pelatihan dalam rangka mengembangkan usaha serta kaderisasi

pengelola Koperasi. Di samping itu, telah dilakukan studi banding ke Koperasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan praktek baik dalam pengelolaan Koperasi di masa depan.

Rencana Kerja tahun 2020 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun 2019. Kegiatan usaha tersebut meliputi usaha-usaha Simpan Pinjam, Toko, Fotokopi dan Travel.

Kegiatan usaha Simpan Pinjam merupakan usaha yang sangat dominan dan potensial serta menjadi sumber pendapatan utama bagi Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud. Usaha ini turut membantu Anggota dalam peningkatan kesejahteraan melalui pinjaman yang diperuntukan untuk biaya pendidikan, perumahan, pengobatan, pemberdayaan keluarga, dan kegiatan usaha (home industri). Upaya peningkatan layanan kepada anggota telah dilakukan melalui aplikasi berbasis online sehingga memudahkan anggota untuk mengajukan pinjaman, mengetahui simpanan, mengetahui sisa pinjaman, serta mendapatkan informasi perkembangan Koperasi secara mudah dan cepat.

Kegiatan usaha Toko Koperasi Balitbang, perkembangan cukup baik dan memberikan prospek sebagai unit usaha strategis yang dapat memberikan layanan kebutuhan kantor maupun kebutuhan para anggotanya. Di samping itu, lokasi yang strategis sangat menguntungkan untuk memberikan layanan kepada pegawai di lingkungan kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta. Inovasi yang akan dilakukan pada tahun 2020 dengan layanan penjualan secara daring (Toko On-line), yang diharapkan akan mempermudah anggota dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan pendapatan toko akan semakin meningkat.

Kegiatan Fotokopi dan Travel di tahun 2019 dapat mencapai target sesuai dengan yang diharapkan dalam RAPB, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Usaha ini di masa depan perlu mendapat perhatian agar tetap memiliki prospek yang cukup baik. Layanan fotokopi perlu dikelola secara profesional dan dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud. Oleh karena itu ke depan

perlu adanya penambahan aset-aset diantaranya mesin fotokopi baru, alat pemotong kertas, meja laptop untuk pelayanan jasa print. Selanjutnya untuk meningkatkan layanan travel perlu peningkatan jaringan internet agar pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih maksimal, serta optimalisasi koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud.

Rencana Kerja Bidang Organisasi dan Manajemen diprioritaskan untuk pemberdayaan anggota dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola koperasi melalui pendidikan atau pelatihan baik untuk anggota perorangan maupun untuk Pengurus, Pengawas, dan Karyawan. Pembinaan terhadap karyawan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan semangat dan integritas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Para pengelola Koperasi juga harus terus ditingkatkan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan koperasi, sehingga Koperasi dapat berkembang sebagai badan usaha atau perusahaan yang mampu bersaing dalam sistem ekonomi pasar serta memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya. Di samping itu perlu ditingkatkan peran serta anggota dalam mendukung dan memanfaatkan usaha Koperasi.

Keberadaan Koperasi tidak hanya untuk anggota semata, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan instansi di lingkungan Balitbang Kemendikbud. Untuk itu Koperasi Balitbang terus berkomitmen memperhatikan kesejahteraan anak anggota golongan I dan II serta anak yatim/piatu keluarga pegawai Balitbang Kemendikbud agar tetap dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bagi Anggota yang pensiun juga diberikan santunan sebagai bekal memasuki purna tugas.

Diharapkan dengan pengelolaan kegiatan yang profesional dan dengan adanya keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020 akan berjalan lancar dan target maupun Sisa Hasil Usaha dapat dicapai. Namun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa badai pandemic covid yang melanda pada tahun 2020 ini menjadi

tantangan terbesar dalam sektor usaha, sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara realistis.

Penyesuaian dan Revisi RAPBK

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 dan terus meningkatnya kasus terpapar covid di wilayah DKI Jakarta pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga dikeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam kesempatan khusus, Presiden Joko Widodo telah meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19. Salah satu caranya, menurut Jokowi, adalah dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah. "Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020). Arahan Presiden selanjutnya disikapi dengan petunjuk operasional oleh Gubernur DKI Jakarta dan Menteri untuk menerapkan kebijakan terkait.

- a. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Menjaga Jarak Aman antar Warga dalam Bermasyarakat (*sosial distancing*) dalam rangka Antisipasi dan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Propinsi DKI Jakarta.
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kemendikbud.

Bersarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud tersebut maka para pegawai di Kemendikbud ditetapkan untuk bekerja dari rumah (*working from home*).

Kebijakan PSBB dan bekerja dari rumah (WFH) telah mempengaruhi perekonomian nasional, tidak terkecuali usaha koperasi pegawai Balitbang Kemendikbud. Dampak PSBB dan Penutupan kantor Kemendikbud dengan pemberlakuan bekerja dari rumah di lingkungan Kemendikbud telah menyebabkan

usaha dan layanan koperasi tidak berjalan dengan baik. Dampak terburuk adalah dengan penutupan usaha Toko dan Fotokopi selama Maret sampai dengan Juni 2020. Usaha Toko yang selama ini ramai oleh pembeli dari para pegawai dan tamu di lingkungan Kemendikbud, selama masa pandemic dan *WFH* menjadi sepi pengunjung. Layanan Snack dan makan siang juga mengalami penurunan drastis karena tidak ada kegiatan Rapat

Tidak adanya kegiatan rapat-rapat kerja, pelatihan, workshop, maupun seminar yang dilakukan secara luring/tatap muka, juga sangat berdampak pada usaha fotokopi yang sepi order. Selama hamper empat bulan usaha fotokopi tutup, sementara sewa PNBK tempat usaha dan gaji karyawan tetap berjalan.

Dampak lainnya yang sangat berpengaruh adalah usaha travel dan ticketing, dengan pembatasan perjalanan dinas dan pertemuan rapat kerja di hotel. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Kerjasama dengan pihak travel pada tahun 2020 ini belum terlaksana.

Usaha di bidang perumahan juga sangat terpengaruh dengan kondisi pandemic, minat dan daya beli masyarakat terhadap kepemilikan rumah mengalami penurunan, mengakibatkan proses pembangunan perumahan terhambat. Hal tersebut menjadikan proses kerjasama dengan Pihak Parasyasa pada tahun 2020 dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang Kerjasama.

Begitu juga dengan harga logam mulia meningkat drastis pada Februari semula harga per gram sebesar Rp 813.000,- secara terus menerus meningkat pada bulan Agustus sebesar Rp 1.065.000,- lonjakan harga yang terus melambung menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat.

Dampak pandemic covid juga berimbas pada tingginya jumlah anggota yang mengambil simpanan sukarela. Pada tahun 2020 hingga pertengahan tahun jumlah anggota yang mengambil simpanan sukarela mencapai Rp 529.000.000,- meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berkurangnya simpanan ini berpengaruh pada pendapatan jasa simpanan di bank.

Persoalan anggota yang menunggak juga bertambah seiring dengan kondisi pandemic, hingga akhir tahun besarnya angsuran yang macet mencapai Rp 112.078.385,-

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pengurus dan pengawas melakukan penyesuaian dan revisi atas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) dan tahun 2020.

BAB II. RENCANA KERJA PENGURUS TAHUN 2020

Sesuai dengan Keputusan Pembina Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Nomor: 001/KEP/KOPLITBANG/III/2019 tentang Pembentukan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Periode 2019-2021, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2020 dengan urutan sebagai berikut:

A. Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan

1. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan usaha Koperasi;
2. Peningkatan tata kelola organisasi dan kelembagaan Koperasi;
3. Optimalisasi peran dan tanggungjawab manajer dalam pengelolaan usaha Koperasi;
4. Kaderisasi Pengurus melalui pendidikan dan pelatihan calon Pengurus Koperasi;
5. Peningkatan peran serta dalam kegiatan dan usaha PKPRI DKI Jakarta.

B. Pembinaan Anggota

1. Kegiatan Cerdik Sehari Perkoperasian;
2. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding;
3. Pembinaan anggota yang bermasalah dalam usaha simpan pinjam (kredit macet).

C. Pelayanan Pendidikan dan Sosial

1. Bantuan dana pendidikan kepada Anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud, khususnya Golongan I dan II yang masih memiliki anak di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
2. Bantuan dana pensiun kepada Anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud.
3. Kegiatan halal bihalal sebagai upaya peningkatan siaturahmi, keimanan dan ketaqwaan.
4. Iuran dana kematian sebesar Rp 10.000,- per bulan bagi anggota dan keluarganya (istri/suami, anak, dan orangtua).

D. Pengelolaan Usaha

Pengelolaan Usaha Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud tahun 2020 akan dilaksanakan secara efisiensi, efektifitas, dan optimalisasi usaha untuk peningkatan pendapatan. Adapun cara pelaksanaan pengelolaan usaha sebagai berikut:

1. Usaha Simpan Pinjam
 - a. Layanan pinjaman kepada Anggota Koperasi Pegawai Balitbang;
 - b. Layanan pinjaman sementara kepada satuan kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor;
 - c. Penyelesaian tunggakan pinjaman Anggota Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud yang bermasalah;
 - d. Peningkatan simpanan sukarela anggota;
 - e. Peningkatan layanan simpan pinjam secara online, melalui pengembangan laman koperasi (<http://koperasi-litbangdikbud.com>);
 - f. Kerjasama dengan pihak asuransi jiwa syariah untuk melindungi Anggota yang melakukan pinjaman;
 - g. Layanan pencairan uang pinjaman melalui transfer ke rekening anggota;
 - h. Layanan kuitansi/bukti tanda terima dikirim melalui email anggota.
 - i. Memberikan poin undian doorprize atas akumulasi pinjaman dan simpanan sebagai bentuk penghargaan.
2. Usaha Toko
 - a. Melayani kebutuhan kantor sehari-hari (ATK, snack, minuman, teh, gula, kopi);
 - b. Menyediakan kebutuhan Anggota (rokok, makanan ringan, obat-obatan, permen, perlengkapan mandi, dll);
 - c. Melayani pegawai maupun masyarakat di lingkungan Kemendikbud secara cepat dan terjangkau;
 - d. Melayani paket bingkisan lebaran;
 - e. Melayani pembayaran melalui kartu Debet (EDC) BRI;
 - f. Meningkatkan kualitas snack dan penyajiannya untuk kebutuhan rapat;

- g. Meningkatkan layanan penjualan secara online.
 - h. Sistem reward belanja kepada anggota Koperasi Pegawai Balitbang.
3. Usaha Fotokopi dan Travel
- a. Melayani fotokopi;
 - b. Melayani jilid spiral dan hardcover;
 - c. Melayani laminating dokumen;
 - d. Melayani cetak hitam putih dan berwarna;
 - e. Melayani pemesanan tiket domestik dan internasional;
 - f. Melayani jasa event organizer.

E. Pengembangan Usaha

1. Simpan Pinjam
- a. Meningkatkan Simpanan wajib berdasarkan golongan, golongan IV sebesar Rp 400.000, golongan III sebesar Rp 300.000, dan golongan II sebesar Rp 250.000,-;
 - b. Kerja sama usaha dengan unit Koperasi di lingkungan Kemendikbud;
 - c. Penyertaan modal usaha pada PKPRI DKI Jakarta;
 - d. Integrasi sistem aplikasi simpan pinjam dengan aplikasi Toko online;
 - e. Pemanfaatan dana simpanan untuk peningkatan usaha Koperasi;
 - f. Melakukan kerjasama dengan Perumnas untuk kredit kepemilikan rumah;
 - g. Menyediakan kredit kepemilikan logam mulia;
 - h. Kerjasama dengan unit koperasi lain untuk pengembangan usaha;
 - i. Simpanan khusus untuk Ibadah Umroh.
2. Toko
- a. Optimalisasi toko online melalui penambahan SDM yang menangani aplikasi secara khusus serta promosi secara intensif;
 - b. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyediaan snack dan konsumsi yang berkualitas;

- c. Melakukan kerja sama dengan Dharma Wanita unit Balitbang untuk menyelenggarakan bazar di lingkungan Kemendikbud Senayan;
 - d. Penjualan sembako untuk memenuhi kebutuhan rutin para anggota;
 - e. Mengembangkan kerjasama dengan penyedia snack dan makanan untuk meningkatkan layanan kebutuhan rapat di lingkungan kemendikbud;
 - f. Usaha penjualan air mineral galon;
 - g. Pemberlakuan penghargaan untuk anggota yang rutin berbelanja di toko.
 - h. Pengadaan alat transportasi untuk mendukung operasional dan layanan pesan antar pelanggan di luar lingkungan Kemendikbud;
3. Jasa lainnya
- a. Megadakan MoU dengan Bank BRI untuk layanan pembayaran tagihan listrik, TV kabel, BPJS, dsb;
 - b. Mengadakan bazaar murah Koperasi Bersama UMKM, Bulog, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian;
 - c. Meningkatkan layanan jasa percetakan dan penjilidan;
 - d. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.
 - e. Kerjasama dengan travel untuk melayani penjualan tiket dan paket meeting, serta jasa event organizer;

F. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud perlu dilakukan dengan baik dan akuntabel untuk mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi pengeluaran. Guna mencapai hal tersebut direncanakan untuk melakukan:

1. Penyusunan standar biaya umum untuk menyelenggarakan operasional organisasi;
2. Efisiensi belanja untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud;

3. Mengelola keuangan dengan standar akuntansi koperasi baik dalam penatakelolaan pembukuan maupun dalam pelaporan;
4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan;
5. Melakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik;
6. Penggunaan sistem akuntansi berbasis aplikasi.

G. Pengelolaan Aset

Dalam pengelolaan aset ditujukan untuk memperkuat status kepemilikan aset dan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud, serta pemeliharannya agar berfungsi lebih maksimal.

Rencana yang akan dilakukan melalui:

1. Perawatan dan pemeliharaan ruangan usaha simpan pinjam, toko, fotokopi dan travel.
2. Perbaikan dan perawatan instalasi jaringan listrik dan telepon.
3. Pembayaran sewa tempat usaha sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Penyusunan mekanisme dan prosedur pembelian, penggunaan, dan perawatan aset Koperasi.

H. Pengelolaan Personil/Karyawan

Pengelolaan personil ini diarahkan untuk mengefektifkan tenaga yang ada agar lebih profesional, melalui:

1. Peningkatan kompetensi karyawan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Penetapan uraian tugas dan target kinerja setiap karyawan.
3. Evaluasi kinerja individu secara terus menerus.
4. Peningkatan disiplin kerja karyawan agar terwujud budaya kerja.
5. Pembinaan dan penyegaran tugas dan tanggung jawab (rotasi).

6. Penghargaan dan hukuman kepada karyawan berdasarkan prestasi dan tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, pengurus mengajukan rancangan perubahan RK & RAPB pada Tahun Buku 2020 dengan target memperoleh pendapatan sebesar Rp1.573.682.274,00. Jika dibandingkan dengan rencana awal tahun 2020 sebesar Rp2.135.205.957,80 maka mengalami penurunan sebesar Rp561.523.683,80 atau sebesar 26,30%.

Perubahan pengeluaran biaya tahun buku 2020 menjadi Rp1.084.908.840,00 jika dibandingkan dengan rencana awal tahun 2020 sebesar Rp1.339.453.165,00 yang dapat menghemat pengeluaran sebesar Rp254.544.325,00 atau sebesar 19,00%. Dengan perhitungan tersebut, maka target pendapatan dan pengeluaran yang akan tercapai mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2020 sebesar Rp488.773.434,00. Jika dibandingkan dengan perhitungan SHU awal tahun 2020 sebesar Rp795.752.792,80 maka mengalami penurunan sebesar Rp306.979.358,80 atau sebesar 38,58%.

BAB III. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 2020

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020 telah disusun secara cermat, dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan pada tahun 2019. Capaian sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh pada tahun sebelumnya turut menjadi acuan agar SHU senantiasa untuk dapat ditingkatkan bagi kesejahteraan anggotanya.

Secara keseluruhan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020

MATA ANGGARAN	RAPB 2020	REVISI RAPB 2020
A PENDAPATAN		
1 Simpan Pinjam	1.140.776.000,00	1.018.000.000,00
2 Toko	622.429.957,80	379.682.274,00
3 Fotokopi dan Travel	372.000.000,00	176.000.000,00
<i>Jumlah Pendapatan</i>	2.135.205.957,80	1.573.682.274,00
B PENGELUARAN		
1 Biaya Operasional	181.356.685,00	107.390.000,00
2 Biaya Administrasi dan Umum	516.932.480,00	434.966.160,00
3 Biaya Kesejahteraan Anggota	143.000.000,00	145.515.680,00
4 Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas	44.100.000,00	29.926.000,00
5 Biaya Kantor	121.800.000,00	108.800.000,00
6 Biaya Organisasi, Pendidikan, dan Sosial	228.016.000,00	186.912.000,00
7 Biaya Bank dan Pajak	3.780.000,00	2.010.000,00
8 Biaya Lain-Lain	100.468.000,00	69.389.000,00
<i>Jumlah Pengeluaran</i>	1.339.453.165,00	1.084.908.840,00
C SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		
1 Jumlah Pendapatan (A)	2.135.205.957,80	1.573.682.274,00
2 Jumlah Pengeluaran (B)	1.339.453.165,00	1.084.908.840,00
<i>Jumlah</i>	795.752.792,80	488.773.434,00
D PAJAK SHU	99.469.099,10	61.096.679,25
E SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK	696.283.693,70	427.676.754,75

Rincian Revisi RAPB tersebut merupakan gabungan dari masing-masing Bidang disesuaikan dengan program kerja yang akan dilakukan dan peluang peningkatan usaha di tahun mendatang. Rincian RAPB masing-masing Bidang sebagaimana terlampir.

A. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Simpan Pinjam

Tabel 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Simpan Pinjam

MATA ANGGARAN		RAPB 2020	REVISI RAPB 2020
A	I PENDAPATAN JASA		
	1 Jasa Pinjaman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	2 Jasa Simpanan di Bank	12.000.000,00	10.800.000,00
	3 Jasa Asuransi	10.200.000,00	7.200.000,00
	II PENDAPATAN LAINNYA		
	1 Logam Mulia	18.576.000,00	-
	2 Parayasa	100.000.000,00	-
	<i>Jumlah Pendapatan</i>	1.140.776.000,00	1.018.000.000,00
B	PENGELUARAN		
	1. Biaya Administrasi dan Umum		
	a. Gaji Karyawan	114.540.160,00	109.340.160,00
	b. Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer	96.000.000,00	78.000.000,00
	c. Lembur	15.312.000,00	15.312.000,00
	d. Honor PPABP	9.600.000,00	9.600.000,00
	e. Biaya Admin Pemotongan Gaji di Bank BRI & Mandiri	9.600.000,00	9.600.000,00
	<i>Jumlah</i>	245.052.160,00	221.852.160,00
	2. Biaya Kesejahteraan		
	a. Tunjangan Hari Raya (THR) : Pembina, Pangarah, Pengurus, Pengawas	10.000.000,00	10.000.000,00
	b. Natura/Bingkisan Lebaran	105.000.000,00	105.000.000,00
	c. Penyelenggaraan Halal Bihalal	28.000.000,00	28.000.000,00
	<i>Jumlah</i>	143.000.000,00	143.000.000,00
	3. Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas		
	a. Rapat Pengurus dan Pengawas	20.000.000,00	10.626.000,00
	b. Perjalanan Dinas	24.100.000,00	19.300.000,00
	<i>Jumlah</i>	44.100.000,00	29.926.000,00
	4. Biaya Operasional		
	a. ATK, Fotokopi dan Penggandaan	8.400.000,00	7.200.000,00
	b. Keperluan Operasional Kantor	8.400.000,00	3.600.000,00
	c. Pembelian Barang Inventaris	5.000.000,00	11.000.000,00
	<i>Jumlah</i>	21.800.000,00	21.800.000,00
	5. Biaya Organisasi, Pendidikan, dan Sosial		

	a. Pengawasan dan Pemeriksaan	17.864.000,00	7.266.000,00
	b. Konsultasi, menghadiri RAT/RAK PKPRI	2.700.000,00	-
	c. Simpanan Wajib Keanggotaan PKPRI	1.440.000,00	1.440.000,00
	d. Biaya Pelaksanaan RAT dan RK & RAPB	155.800.000,00	155.800.000,00
	e. Biaya Penyusunan RAK RK dan RAPB 2021	12.912.000,00	7.056.000,00
	f. Dukungan acara PHBN	5.000.000,00	-
	g. Biaya Promosi (Cetak Kalender)	13.300.000,00	12.950.000,00
	h. Pembinaan/Bimtek Pengurus/Pengawas/Anggota	15.000.000,00	-
	i. Penerimaan tamu dan study banding	4.000.000,00	2.400.000,00
	Jumlah	228.016.000,00	186.912.000,00
6.	Biaya Bank dan Pajak		
	a. Biaya Administrasi Bank	180.000,00	150.000,00
	b. Pajak simpanan bank	3.600.000,00	1.860.000,00
	Jumlah	3.780.000,00	2.010.000,00
7.	Biaya Pelaporan Pertanggungjawaban		
	a. Pengembangan aplikasi simpan pinjam	7.000.000,00	16.000.000,00
	b. Penyusunan Laporan RAT TB.2019	48.468.000,00	32.889.000,00
	c. Biaya Akuntan Publik Laporan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00
	d. Biaya Perawatan kantor Koperasi	5.000.000,00	500.000,00
	Jumlah	70.468.000,00	59.389.000,00
	Jumlah Pengeluaran	756.216.160,00	664.889.160,00
C	SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		
	1 Jumlah Pendapatan (A)	1.140.776.000,00	1.018.000.000,00
	2 Jumlah Pengeluaran (B)	756.216.160,00	664.889.160,00
	Jumlah	384.559.840,00	353.110.840,00
D	PAJAK SHU	48.069.980,00	44.138.855,00
E	SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK	336.489.860,00	308.971.985,00

Beberapa Catatan Penyesuaian Bidang Simpan Pinjam :

1. Kerjasama dengan Pihak Perumnas Parayasa dilakukan peninjauan Kembali karena dampak pandemic covid-19 dan adanya mekanisme konsep saling menguntungkan belum terjadi kesepakatan.
2. Pendapatan usaha dari penjualan logam mulia tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kebijakan Kerjasama dari pihak ANTAM dan masih rendahnya minat Anggota dalam kredit kepemilikan logam mulia.
3. Pendapatan jasa simpanan pada bank mengalami penurunan karena terjadinya penurunan keanggotaan.
4. Pendapatan jasa kontribusi dari pihak JMA Syariah jumlah pinjaman dari anggota mengalami penurunan.

B. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Toko

Tabel 3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Toko

MATA ANGGARAN	RAPB 2020	REVISI RAPB 2020
A PENDAPATAN		
Penjualan	3.734.619.525	2.278.117.910
Pengeluaran (HPP)	3.112.189.567	1.898.435.636
<i>Jumlah Pendapatan Bersih</i>	622.429.958	379.682.274
B PENGELUARAN		
I BIAYA OPERASIONAL		
Biaya Operasional	79.800.000	43.890.000
<i>Jumlah</i>	79.800.000	43.890.000
II BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM		
1 Biaya Administrasi		
a. Gaji Karyawan	111.940.160	137.094.000
b. Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer	30.000.000	21.000.000
<i>Jumlah</i>	141.940.160	158.094.000
2 Biaya Kesejahteraan		
a. Tunjangan ketenagakerjaan/BPJS	-	2.515.680
<i>Jumlah</i>	-	2.515.680
3 Biaya Kantor		
a. Sewa Tempat	60.000.000	84.000.000
b. Biaya Promosi	10.000.000	3.000.000
<i>Jumlah</i>	70.000.000	87.000.000
4 Biaya Lain-Lain		
a. Pengembangan aplikasi toko online	10.000.000	-
b. Renovasi Interior	10.000.000	-
c. Biaya Akuntan Publik*) TB 2019	10.000.000	10.000.000
<i>Jumlah</i>	30.000.000	10.000.000
<i>Jumlah Pengeluaran</i>	321.740.160	301.499.680
C SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		
1 Jumlah Pendapatan (A)	622.429.958	379.682.274
2 Jumlah Pengeluaran (B)	321.740.160	301.499.680
<i>Jumlah</i>	300.689.798	78.182.594
D PAJAK SHU	37.586.225	9.772.824
E SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK	263.103.573	68.409.770

Beberapa catatan yang mempengaruhi penyesuaian RAPB 2020 usaha toko, antara lain:

- Penyesuaian target penjualan dengan mempertimbangkan pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020. Berdasarkan surat edaran Gubernur DKI Jakarta dan surat edaran Sekretariat Jenderal Kemendikbud terkait pembatasan aktivitas sosial di luar rumah, menjadi penyebab penurunan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor. Faktor tersebut menyebabkan penurunan jumlah penjualan toko Koperasi dan terdapat penyesuaian penurunan target penjualan sebesar 39% dari RAPB sudah dihitung melalui rapat bersama anggota bersama pengawas Koperasi.
- Efisiensi biaya operasional dilakukan untuk menekan jumlah pengeluaran dengan mempertimbangkan pemasukan dari penjualan toko. Biaya Operasional dapat ditekan dengan mempertimbangkan aktivitas penjualan di toko yang berkurang akibat pandemi covid-19. Penghematan sebesar 45% sudah dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan dari aktivitas bisnis untuk menunjang toko koperasi.
- Penambahan beban gaji karyawan (termasuk THR) sebanyak 1 orang ke usaha toko koperasi dari yang sebelumnya 2 menjadi 3. Perpindahan pegawai yang bersangkutan menyebabkan jumlah beban gaji karyawan naik sebesar 22,47% dari RAPB awal. Mutasi pegawai ini dilakukan untuk penyegaran di bisnis usaha Koperasi pada umumnya.
- Terjadi efisiensi biaya honor untuk Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi sebesar 30%. Mengingat masa pandemi covid-19 Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas dan Manager melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.
- Biaya kesejahteraan ini muncul akibat penyesuaian regulasi pemerintah terkait kewajiban keikutsertaan tenaga kerja kedalam program BPJS. Seluruh karyawan koperasi sebanyak 6 pegawai telah diwajibkan untuk ikut serta dalam program ini.

- Lokasi yang strategis menjadi modal penting dalam bisnis jual beli dari bidang Toko. Biaya sewa tempat menjadi tanggungan toko dengan luas 54M, mengalami kenaikan sewa tarif PNBK pada tahun 2020, namun dalam pandemic covid-19 penggunaannya tidak dapat dioptimalkan untuk usaha toko, yang sempat tutup selama tiga bulan.
- Biaya pengembangan aplikasi toko online dan renovasi interior tidak dipergunakan sebagai bentuk efisiensi atas biaya-biaya yang dikeluarkan
- Biaya ini diperlukan untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan yang valid dari Kantor Akuntan Publik yang telah diseleksi. Tujuannya adalah menghasilkan laporan sebagai pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan usaha selama 1 tahun.

C. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Fotocopy & Travel

Tabel 4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Usaha Fotocopy & Travel

MATA ANGGARAN		RAPB 2020	REVISI RAPB 2020
A PENDAPATAN			
1	Fotokopi	217.000.000	108.500.000
2	Tiket	85.000.000	-
3	Jasa Lainnya (pulsa, Token listrik, TV Kabel, telepon, bazar)	60.000.000	60.000.000
4	Percetakan	10.000.000	7.500.000
	Jumlah	372.000.000	176.000.000
B PENGELUARAN			
I BIAAYA OPERASIONAL			
1	Fotokopi	98.374.185	30.000.000
2	Percetakan	-	500.000
3	Deposit pulsa	1.732.500	33.000.000
4	Biaya Transport Belanja	1.450.000	-
5	Biaya sewa	30.000.000	-
	Jumlah	131.556.685	63.500.000
II BIAAYA ADMINISTRASI DAN UMUM			
1	Gaji Karyawan	111.940.160	38.220.000
2	Honor Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer	18.000.000	16.800.000
	Jumlah	129.940.160	55.020.000
	Jumlah Pengeluaran	261.496.845	118.520.000
C SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK			
1	Jumlah Pendapatan (A)	372.000.000	176.000.000
2	Jumlah Pengeluaran (B)	261.496.845	118.520.000
	Jumlah	110.503.155	57.480.000
D PAJAK SHU		13.812.894	7.185.000
E SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		96.690.261	50.295.000

Beberapa catatan yang mempengaruhi penyesuaian RAPB 2020 usaha fotokopi dan travel, antara lain:

- Penurunan target pendapatan bidang fotokopi yang signifikan akibat pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020. Selain pembatasan aktivitas sosial di luar rumah dan penurunan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor, faktor digitalisasi laporan menjadi penyebabnya. Faktor tersebut menyebabkan

penurunan jumlah pendapatan fotokopi yang signifikan dan terdapat penyesuaian penurunan target penjualan sebesar 50% dari RAPB sudah dihitung melalui rapat bersama anggota bersama pengawas Koperasi.

- Terdapat efisiensi biaya operasional yang meliputi transport belanja dan sewa tempat dilakukan untuk menekan jumlah pengeluaran dengan mempertimbangkan pemasukan dari usaha fotokopi. Biaya Operasional ini tidak dipergunakan karena dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan aktivitas di lingkungan usaha fotokopi menjadi terbatas. Penghematan ini bertujuan menekan pengeluaran sebanyak mungkin untuk kelangsungan usaha fotokopi yang lebih menguntungkan.
- Pengurangan beban gaji karyawan (termasuk THR) menjadi 1 orang dari yang sebelumnya 2 menjadi 1. Perpindahan pegawai yang bersangkutan menyebabkan jumlah beban gaji karyawan turun sebesar 65,86% dari RAPB awal. Mutasi pegawai ini dilakukan untuk penyegaran di bisnis usaha Koperasi pada umumnya.
- Kebijakan PSBB di lingkungan Kemendikbud, mengakibatkan rencana kegiatan Bazar di Lobby Gedung E hanya dapat dilaksanakan di awal tahun, dan tidak dapat dilaksanakan kembali.
- Kebijakan pembatasan perjalanan dinas dalam masa pandemic covid-19 serta tidak terjadinya kesepakatan kerja sama menjadi penyebab Kerjasama dengan pihak travel belum terlaksana.
- Terjadi efisiensi biaya honor untuk Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi menjadi 93,33% dari RAPB awal. Mengingat masa pandemi covid-19 Pembina, Pengarah, Pengurus, Pengawas dan Manager tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

BAB IV. PENUTUP

Revisi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud Tahun 2020 dilakukan sebagai upaya untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian atas pendapatan dan pengeluaran usaha Koperasi Tahun Buku 2020 mengingat kebijakan dan situasi dan kondisi di masa pandemic covid-19.

Kami berharap perhatian dan dukungan seluruh Anggota dalam upaya peningkatan usaha Koperasi Pegawai Balitbang Kemendikbud ke depan semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan seluruh Anggota.

Jakarta, 31 Juli 2020

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI BALITBANG KEMENDIKBUD

Ketua,



Hafidz Muksin

Wakil Ketua,



Novrian Satria Perdana

Sekretaris,



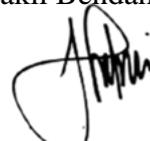
Adhika Widhi Nugraha

Bendahara,



Syaryanis

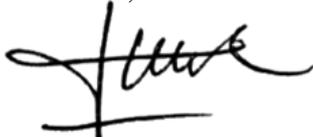
Wakil Bendahara,



Hasti Kusumawati

Mengetahui/Menyetujui Pengawas:

Sekretaris,



Nur Berlian Venus Ali

Anggota,



Ana Munifah